

TENTANG

ENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Surat Kejadian Nomor 12/125-4/12036/333/96 tertanggal 26 - 4 - 96 tentang hasil penelitian
permasalahan pendidikan Madrasah Swasta dililingkan Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Nusa Tenggara Barat.
- Balai dalam rangka Penelitian Madrasah, dipandang perlu untuk mendukung penyelesaian
terhadap permasalahan pendidikan Madrasah Swasta dililingkan Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Nusa Tenggara Barat.
- Balai Madrasah Swasta yang berdasarkan dalam kolom 2 komplain Keputusan ini tidak sejalan
dengan tujuan dan sifatnya sendiri, serta dapat menyebabkan permasalahan pendidikan
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 dan PP. Nomor 27 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
- a. Nomor 64 Tahun 1974;
- b. Nomor 13 Tahun 1984 yang telah dicabut kali dilakukan dan disampaikan oleh Menteri Agama
- Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1983;
4. Keputusan Birobeni Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama yang telah diulah dan disampaikan terakhir dengan Keputusan Menteri
Agama Nomor 72 Tahun 1984;
5. Keputusan Menteri Agama;
- a. Nomor 362 Tahun 1972 tentang Madrasah Hafidzah;
- b. Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
- c. Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
6. Keputusan Menteri Agama;
- a. Nomor 312 Tahun 1973 tentang Kuisikulum Pendidikan Dasar incilah khas Agama Islam;
- b. Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kuisikulum Madrasah Aliyah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1979 tentang Status Madrasah Swasta di berlakukannya
Dirakernas Jenjang Pendidikan Kelenjungan Agama Islam;
8. Keputusan Dirakernas Jenjang Pendidikan Kelenjungan Agama Islam Nomor : 28 AH/1989 tentang
syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

M I M I T U S K A N

- Menetapkan Peresmian atas Pendirian Madrasah Swasta yang berdasarkan dalam kolom 2 lampiran
keputusan ini;
- Kepada Menteri Kewato seperti diwakili diketahui pertama di atas diberikan status sebagai

MAKRABAH TEGUATAT

- Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini
tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diulah dan diwajibkan
sebagaimana mestinya.
- Segala sesuatu akan diulah dan ditujukan kepada selanjutnya jika ternyata dikenalnya beri
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Surat Keputusan ini dibekali kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Tgl. tanda tangan : 29 - 4 - 1996
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Salah ditandatangani oleh :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama di Lombok
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama di Lombok
3. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama di Lombok
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama di Lombok



STUDAT
NIP 150 017 426

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : E/1-1/235/1996
TANGGAL : 25 - 4 - 1996

DAPATAR MARDANAI SUWASTA, ALAMAT, STATUS DAN NO. PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Mardanai	Status	No. Piagam
1.	RA. HM. Kongkuru, Desa Sungai Rajak Kec. Saitra Kabupaten Lombok Timur.	Tercantat	

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROV. NUSA TENGGARA-BARAT



H. M. TUBAAT
NIP. 150617426